Pendampingan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2014 Kota Mojokerto

Satia Nur Maharani

DASAR HUKUM

Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Mojokerto salah satunya adalah berpedoman pada Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadaPemerintah dan Memberikan Laporan Keterangan Pertangungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepadamasyarakat.

Selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka mengenai sistem dan prosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerinlahan Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah NomoI 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan PemerintahDaerah kepada Masyarakat (ILPPD). Perubahan sistem dan prosedur pelaporan tersebut terkandung maksud untuk mewujudkan tertib Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi perangkat daerah baik di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur untuk mengetahui dalam rangka menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LAPORAN AKHIR

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2014 KOTA MOJOKERTO

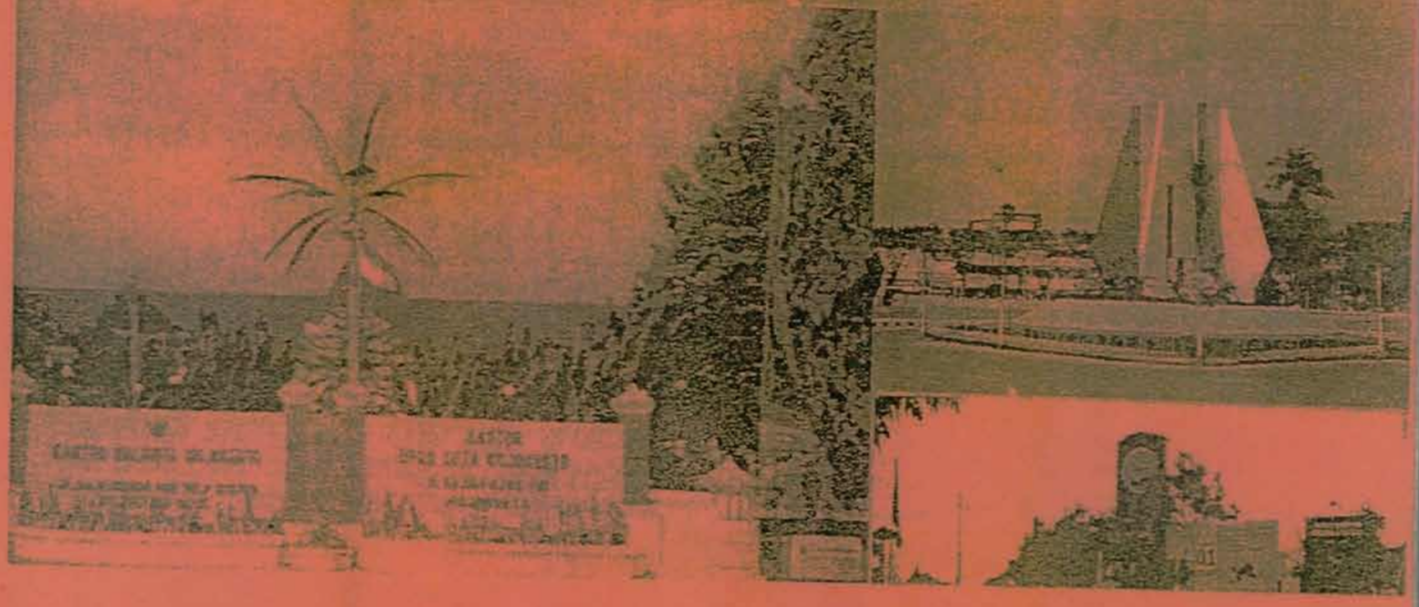
Kerjasama Antara :

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2015



26.1.7

LAPORAN AKHIR

PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) TAHUN 2014 KOTA MOJOKERTO

Kerjasama Antara :

BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M) UNIVERSITAS NEGERI MALANG

2015



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM 1

B. GAMBARAN UMUM DAERAH 1

1) Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis dan Hal Lain Yang Dianggap Perlu 1

2) Letak Geografis dan Topografi Daerah 1

3) Pembagian Wilayah 2

4) Gambaran Umum Demografis Daerah 3

5) Penduduk 3

6) Kondisi Ekonomi 9

7) Potensi Unggulan Daerah 9

8) Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 9

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI 38

A.1. Visi Kota Mojokerto 2009 – 2014 38

A.2. Misi Kota Mojokerto 2009 – 2014 40

A.3. Agenda Pembangunan Kota Mojokerto 2009 – 2014 41

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH 42

C. PRIORITAS DAERAH 54

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI

D. RINGKASAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) 86

E. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN 106
F. PRIORITAS URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN 348
G. INDIKATOR KINERJA KUNCI 378

BAB IV
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
H. DINAS KESEHATAN 388
I. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 390
J. DINAS PEKERJAAN UMUM 392

BAB V
TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
K. KERJASAMA ANTAR DAERAH 394
L. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 400
M. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL 451
N. PEMBINAAN BATAS WILAYAH 454
O. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA..... 454
P. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 456

BAB VI
P E N U T U P
A. KESIMPULAN 459
B. SARAN 460

BAB I
PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Mojokerto salah satunya adalah berpedoman pada Ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Selain berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka mengenai sistem dan prosedur Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah (LPPD), Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (ILPPD). Perubahan sistem dan prosedur pelaporan tersebut terkandung maksud untuk mewujudkan tertib Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi perangkat daerah baik di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten / Kota di Jawa Timur untuk mengetahui dalam rangka menetapkan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1) **Kondisi Geografis Daerah, Batas Administrasi Daerah, Luas Wilayah, Topografis dan Hal Lain Yang Dianggap Perlu**

2) **Letak Geografis dan Topografi Daerah**

Kota Mojokerto mempunyai wilayah seluas 16.46 km^2, terdiri dari dua kecamatan, yaitu Kecamatan Prajurit Kulon dan KecamatanMagersari, yang keseluruhannya mencakup 18 kelurahan. Secara geografis Kota Mojokerto berjarak 52 km dari Kota Surabaya dan terletak pada posisi 7° 27' 0,16" sampai dengan 7° 29' 37, 11" Lintang Selatan serta 112° 24' 14,3" sampai dengan 112° 27' 24" Bujur Timur. Kondisi permukaan tanahnya memiliki kemiringan ke Timur dan Utara antara 0-3

persen, dengan ketinggian rata-rata 22 m di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Sungai Brantas
Sebelah Timur	:	Kec. Mojoanyar Kab. Mojokerto dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto
Sebelah Barat	:	Kec. Sooko Kab. Mojokerto
Sebelah Selatan	:	Kec. Sooko Kab. Mojokerto dan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

3) Pembagian Wilayah

Kota Mojokerto terbagi dalam 2 (dua) wilayah Kecamatan

a. Kecamatan Prajuritkulon luas wilayah 7.776 km^2 terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan, yaitu :
   1) Kelurahan Surodinawan ;
   2) Kelurahan Kranggan ;
   3) Kelurahan Miji ;
   4) Kelurahan Prajuritkulon ;
   5) Kelurahan Blooto ;
   6) Kelurahan Mentikan ;
   7) Kelurahan Kauman dan ;
   8) Kelurahan Pulorejo.

b. Kecamatan Magersari luas wilayah 8.702 km^2 terdiri dari 10 (sepuluh) Kelurahan, yaitu :
   1) Kelurahan Meri ;
   2) Kelurahan Gununggedangan ;
   3) Kelurahan Kedundung :
   4) Kelurahan Wates ;
   5) Kelurahan Magersari ;
   6) Kelurahan Balongsari ;
   7) Kelurahan Jagalan :
   8) Kelurahan Sentanan ;
   9) Kelurahan Purwotengah dan :
   10) Kelurahan Gedongan.

Sebagian besar penggunaan lahan di Kota Mojokerto didominasi oleh lahan terbangun sekitar 53%. meliputi: permukiman (7,28 km² atau 44,23%) : industri (0,45 km² atau 2,71%); perkantoran (0.42 km² atau 2,52%); bangunan umum (0,07 km² atau 0,4%): serta fasilitas umum (0.32 km² atau 1,97%) yang meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan dan peribadatan. Sedangkan lahan tidak terbangun sekitar 47%. terdiri dari: sawah irigasi (6,39 km² atau 38,8%); perkebunan (1,20 km² atau 7,27%); serta ruang terbuka hijau (0,15 km² atau 0.89%) yang meliputi makam, lapangan olahraga dan taman.

Sedangkan jenis tanah di Wilayah Kota Mojokerto sebagian besar terdiri dari aluvial (sekitar 62.74%) dan grumosol (sekitar 37.26%). Jenis tanah ini cukup baik untuk usaha pertanian, karena tanah tersebut terdiri dari endapan tanah liat bercampur dengan pasir halus, berwarna hitam kelabu dengan daya penahan air yang cukup baik dan banyak mengandung mineral yang cukup baik bagi tumbuh-tumbuhan.

Ditinjau dari kondisi permukaan tanahnya, wilayah Kota Mojokerto relatif tidak mempunyai kendala dalam mendukung perkembangan fisik kota. Letak geografisnya pada jalur transportasi regional lintas selatan yang menghubungkan Surabaya – Jogjakarta – Jakarta serta menjadi bagian dari wilayah Gerbangkertasusila enyebabkan Kota Mojokerto memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendukung pengembangan kegiatan pembangunan di Jawa Timur dan berperan utama sebagai pusat aktivitas ekonomi dan jasa bagi wilayah belakangnya (*hinterland*), yaitu Kabupaten Mojokerto dan sekitarnya.

Seperti daerah lainnya yang berada di sekitar garis khatulistiwa, Kota Mojokerto beriklim tropis dan mengalami 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau berkisar antara Bulan Mei sampai September dan di Bulan Oktober sampai April adalah musim hujan dengan curah hujan rata-rata di musim hujan sebesar 177.57 mm.

4) Gambaran Umum Demografis Daerah

5) Penduduk

Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Jumlah Penduduk Kota Mojokerto Tahun 2014 yang disajikan pada Tabel 1.1 adalah merupakan hasil dari Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2014 melalui *entry*

database di aplikasi e-KTP. Kota Mojokerto mempunyai penduduk sebanyak 139.677 jiwa yang tersebar di 2 (dua) kecamatan dan 18 (delapan belas) kelurahan. Penduduk perempuan sebanyak 70.380 jiwa atau sebesar 50,37 persen; dan penduduk yang berjenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 69.297 jiwa atau sebesar 49.63 persen yang tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Penduduk Berdasarkan Kecamatan/Kelurahan dan Jenis Kelamin
Tahun 2014

	Kecamatan / Kelurahan		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah	%
1	**Prajurit Kulon**		**31.498**	**22,55**	**31.899**	**22,83**	**63.397**	**45,38**
	Kranggan		6.904	4.94	7.142	5,11	14.046	10,05
	Miji		4.735	3,38	4.870	3,48	9.605	6,87
	Mentikan		3.479	2,49	3.567	2,55	7.046	5,04
	Kauman		1.527	1.09	1.648	1,17	3.175	2.27
	Pulorejo		3.902	2,79	3.910	2,79	7.812	5,59
	Prajuritkulon		3.893	2,78	3.788	2,71	7.681	5,49
	Surodinawan		3.916	2,80	3.910	2,79	7.826	5,60
	Blooto		3.142	2.24	3.064	2,19	6.206	4,44
2	**Magersari**		**37.799**	**27,06**	**38.481**	**27,54**	**76.280**	**54,61**
	Gunung Gedangan		3.592	2.57	3.589	2,56	7.181	5.14
	Meri		4.197	3.00	4.277	3,06	8.474	6.06
	Magersari		2.978	2,13	3.120	2,23	6.098	4,36
	Gedongan		1.213	0.86	1.282	0,91	2.495	1.78
	Purwotengah		887	0.63	942	0.67	1.829	1,30
	Jagalan		1.593	1.14	1.633	1,16	3.226	2.30
	Sentanan		1.182	0.84	1.285	0.91	2.467	1.76
	Balongsari		4.103	2.93	4.153	2,97	8.256	5.91
	Kedundung		7.845	5.61	7.669	5.49	15.514	11,10
	Wates		10.209	3.60	10.531	7,53	20.740	14.84
	Jumlah	**2014**	**69.297**		**70.380**		**139.677**	
		2013	67.654		68.841		136.495	
		2012	66.335		67.430		133.765	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Berdasarkan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan seperti tertera pada tabel di atas, dapat dikemukakan bahwa Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Kota Mojokerto adalah sebesar 97.04 %, yang berarti di setiap 100 penduduk wanita terdapat 97 penduduk laki-laki.

Selama tiga tahun terakhir (2012-2014) perkembangan jumlah penduduk Kota Mojokerto mengalami kenaikan. Pada tahun 2012 jumlah penduduk seluruhnya adalah 133.765 jiwa. Pada tahun 2013 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 136.495 atau 2,04%. Sedangkan populasi penduduk Kota Mojokerto pada tahun 2014 mengalami kenaikan yang tinggi yaitu sebesar 139.677 atau naik 2,33 %. Meningkatnya angka penduduk pada umumnya adalah karena rendahnya tingkat kematian dan tingginya tingkat kelahiran atau berkurangnya jumlah penduduk pindah dibandingkan dengan yang masuk. tabel yang menggambarkan perkembangan penduduk dari tahun ke tahun Kota Mojokerto :

Tabel 1.2

Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, Perkembangan dan Kepadatan Penduduk Tahun 1995 - 2014

Tahun	Jumlah		Perkembangan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
	Penduduk	Kepala Keluarga		
1995	104.158	24.812	1.39	6.328
1996	105.401	25.411	1,19	6.403
1997	106.135	25.873	0.7	6.448
1998	107.123	26.127	0,93	6.508
1999	108.027	26.895	0.84	6.563
2000	108.858	27.454	0.77	6.613
2001	109.911	28.305	0.97	6.677
2002	111.249	29.304	1.22	6.759
2003	112.547	29.620	1,17	6.838
2004	113.275	29.647	0.65	6.882
2005	113.193	30.216	0.07	6.877
2006	114.088	30.421	0.79	6.931

Tahun	Jumlah		Perkembangan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
	Penduduk	Kepala Keluarga		
2007	115.519	31.046	1.25	7.018
2008	116.355	31.417	0.72	7.069
2009	119.500	38.482	2,70	7.260
2010	120.064	35.479	0.47	7.294
2011	136.276	40.894	13.5	8.284
2012	133.765	40.651	-1,88	8.127
2013	136.495	42.496	2,04	8.293
2014	139.677	43.056	2,13	8.485

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Jumlah penduduk Kota Mojokerto yang banyak dengan luas wilayah yang sangat kecil menyebabkan tingkat kepadatan penduduknya tinggi. Berdasarkan tabel 1.2 di atas, dapat dikemukakan bahwa kepadatan penduduk Kota Mojokerto sangat tinggi, yaitu 8.127 penduduk per km² di tahun 2012; kemudaian mencapai 8.293/km² pada tahun 2013 dan tahun 2014 kepadatan penduduknya menjadi 8.485 km².

Struktur penduduk Kota Mojokerto per jenis kelamin menurut kelompok umurnya ditunjukkan pada tabel 1.3 di bawah. Persebaran penduduk Kota Mojokerto pada kelompok usia cukup merata dari usia 0-4 tahun dengan kisaran angka 7,57% dari total penduduk. Dan kelompok usia terbanyak adalah pada kelompok usia 30-34 tahun, sebesar 12.605 jiwa 9,23%. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) Kota Mojokerto pada akhir tahun 2014 adalah sebesar 95.797 jiwa, atau 70.18% dari total penduduk. Sedangkan penduduk usia non produktif sebanyak 40.698 jiwa, atau 29,82% dari total penduduk, terdiri dari kelompok umur 0-14 th sebesar 32.628 jiwa atau 23.90% dan kelompok umur diatas 64 tahun sebanyak8.070 jiwa atau 5.91%. Sedangkan usia harapan hidup penduduk Kota Mojokerto adalah usia 71.93 tahun.

Tabel 1.3

Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2014

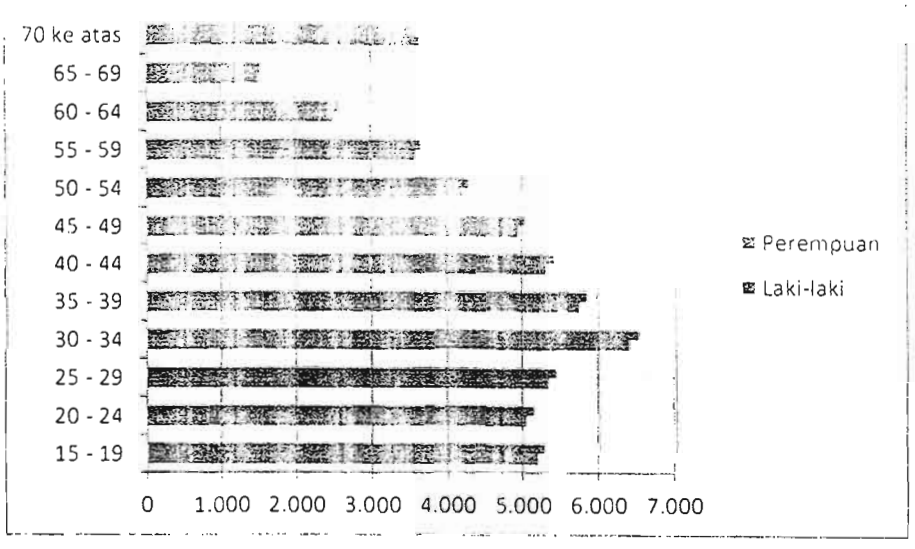
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	4.341	4.418	8.759
5 - 9	5.571	5.669	11.240
10 - 14	5.772	5.876	11.648
15 - 19	5.207	5.299	10.506
20 - 24	5.065	5.154	10.219
25 - 29	5.354	5.453	10.807
30 - 34	6.420	6.544	12.964
35 - 39	5.759	5.869	11.628
40 - 44	5.331	5.440	10.771
45 - 49	4.962	5.059	10.021
50 - 54	4.223	4.310	8.533
55 - 59	3.589	3.676	7.265
60 - 64	2.520	2.579	5.099
65 - 69	1.512	1.551	3.063
70 ke atas	3.660	3.494	7.154
J u m l a h	**69.286**	**70.391**	**139.677**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto

Secara visual, struktur penduduk Kota Mojokerto per jenis kelamin menurut kelompok umurnya ditunjukkan pada Gambar 1.2 di bawah.

Gambar 1.2

Piramida Penduduk Kota Mojokerto Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Akhir Tahun 2014



Dari data dan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk usia produktif Kota Mojokerto jauh lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk usia non produktifnya, sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia, produktif di Kota Mojokerto memiliki potensi jumlah yang besar untuk peningkatan partisipasi pembangunan.

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

No	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (jiwa)
1.	Pertanian/ Peternakan /Perikanan	723
2.	Perdagangan	3.481
3	Industri	424
4.	Jasa Kemasyarakatan	2.973
5.	Konstruksi	611
6.	Pemerintahan	4.948
7.	Pelajar / Mahasiswa	27.288
8.	Swasta	30.064
9.	Wiraswasta	9.873
10.	Lainnya	30.619
11.	Tidak Bekerja	28.673
Jumlah		139.677

Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Ditinjau dari tingkat pendidikan, lebih dari seperempat penduduk usia kerja (15+) di Kota Mojokerto memiliki ijazah setara SLTA (33.09 persen), diikuti oleh penduduk yang memiliki ijazah setara SLTP (14,31 persen), berijazah SD (25.47 persen) dan 10.59 persen berijazah DI ke atas. Kondisi ini akan memberi gambaran kepada investor tentang kualitas dan ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Mojokerto.

- SD / MI : 35.583 Jiwa
- SMP MTs : 19.989 Jiwa
- SMU / SMK / MAN : 46.221 Jiwa
- PT / AKADEMI : 14.799 Jiwa

6) Kondisi Ekonomi

7) Potensi Unggulan Daerah

Potensi unggulan Kota Mojokerto adalah sesuai karakteristik kota yaitu sebagai kota budaya, pendidikan, pariwisata, industri dan perdagangan (BUDIPARINDA). Sehingga potensi unggulan di Kota Mojokerto yaitu :

- Industri Kecil
- Pedagangan
- Budaya
- Jasa dan
- Jasa Transportasi

<u>Sedangkan produk unggulan Kota Mojokerto, yaitu</u> :

- Batik Tulis
- Kapal Phinisi
- Cor Alumunium
- Sepatu / sandal
- Boneka Gips dan
- Onde-onde

8) Pertumbuhan Ekonomi / Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a. Kondisi Makro Ekonomi

Kondisi perekonomian daerah secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara nyata mampu memberikan gambaranmengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto selama tiga tahun terakhir ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 1.5 :

Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2011 - 2013 (%)

Sektor	Tahun		
	2011	2012	2013
1. Pertanian	3,19	2,38	1,05
2. Pertamb & Penggalian	0,00	0,00	0,00
3. Industri Pengolahan	3,33	5,87	5,55
4. Listr, Gas, & Air Bsh	10,30	7,85	1,64
5. Konstruksi	9,09	7,14	7,64
6. Perdg, Hotel, dan Res	7,19	8,85	7,97
7. Pengkt dan Komnkasi	10,33	8,37	8,73
8. Keu. Pers& Jas Persh.	5,54	5,31	5,63
9. Jasa-jasa	4,39	4,38	5,85
PDRB	6,48	7,08	6,86

Perkembangan perekonomian Kota Mojokerto periode 2011 – 2013 menunjukkan angka pertumbuhan yang cukup positif, masing-masing sebesar 6,48 persen , 7,08 persen dan 6,86 persen.

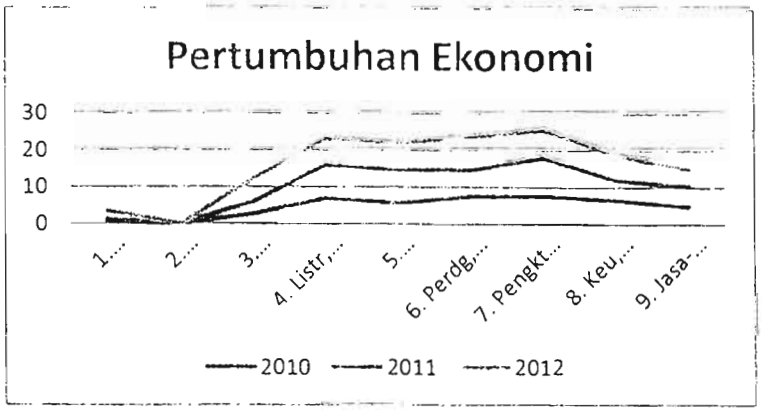
Dari tahun ke tahun, sektor PDRB yang menunjukkan kenaikan persentase pertumbuhan adalah Sektor Industri pengolahan. Sektor

Perdagangan, hotel dan Restoran serta sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor yang cenderung turun adalah Sektor pertanian, sector listrik, gas dan air bersih. Kondisi yang terjadi pada Sektor Pertanian yang lahannya terus terdesak oleh pembangunan fisik Kota Mojokerto dimana pertumbuhannya terus mengalami penurunan. Gambaran pertumbuhan ekonomi di Kota Mojokerto atas dasar harga konstan Tahun 2014 secara sektoral diperlihatkan pada gambar berikut.

Gambar 1.6:

Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan PDRB Kota Mojokerto

Tahun 2010 s/d 2012



Sumber : BPS Kota Mojokerto diolah, 2014

c. Pertumbuhan Sektoral

Ditinjau dari struktur perekonomian Kota Mojokerto, sektor terpenting dalam membentuk besaran PDRB adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Dari tahun ke tahun, sektor ini selalu memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kota Mojokerto sebesar lebih dari 30%. Tahun 2011 sebesar 36,46%; tahun 2012 sebesar 37,06% dan pada tahun 2013 sebesar 37,50%. Lebih jauh mengenai perkembangan peranan masing-masing sektor terhadap perekonomian Kota Mojokerto tahun 2011 - 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 :
Peranan PDRB Menurut Harga Berlaku per Sektor Kota Mojokerto
Tahun 2011 s/d 2013

No	Uraian	2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)
I.	Primer	0.92	0,94	0,94
	1. Pertanian	0.92	0,94	0,94
	2. Pertambangan &Penggalian	0.00	0.00	0.00
II	Sekunder	19,84	19,93	18,96
	3. Industri Pengolahan	16,61	16,59	15,97
	4. Listrik, Gas dan Air Basah	2,39	2,50	2,16
	5. Konstruksi	0,84	0,84	0,83
III	Tersier	79,25	68,46	80,10
	6. Perdag,Hotel, dan Res	38,04	79,13	41,35
	7. Pengangkutan & Komunikasi	13,91	13,88	14,07
	8. Keu, Pers & Jas Perush	6,85	7,01	6,91
	9. Jasa-jasa	20,45	18,07	17,77
PDRB		**100,00**	**100,00**	**100,00**

Dari tabel diatas terlihat bahwa kelompok sektor primer berangsur-angsur naik peranannya sejak tahun 2011 hingga tahun 2013, meskipun nilainya sangat kecil. Kontribusi kelompok sektor primer yang kecil tersebut menyebabkan kenaikan kontribusi pada kelompok sektor tersier, dimana kontribusinya jauh melebihi sektor sekunder. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa penurunan kontribusi sektoral disebabkan oleh kenaikan yang relatif lebih cepat dari kontribusi sektor tertentu dibanding sektor lainnya.

Pada tahun 2011- 2013 terdapat tiga sektor ekonomi yang sangat dominan kontribusinya di Kota Mojokerto. yaitu sektor-sektor:

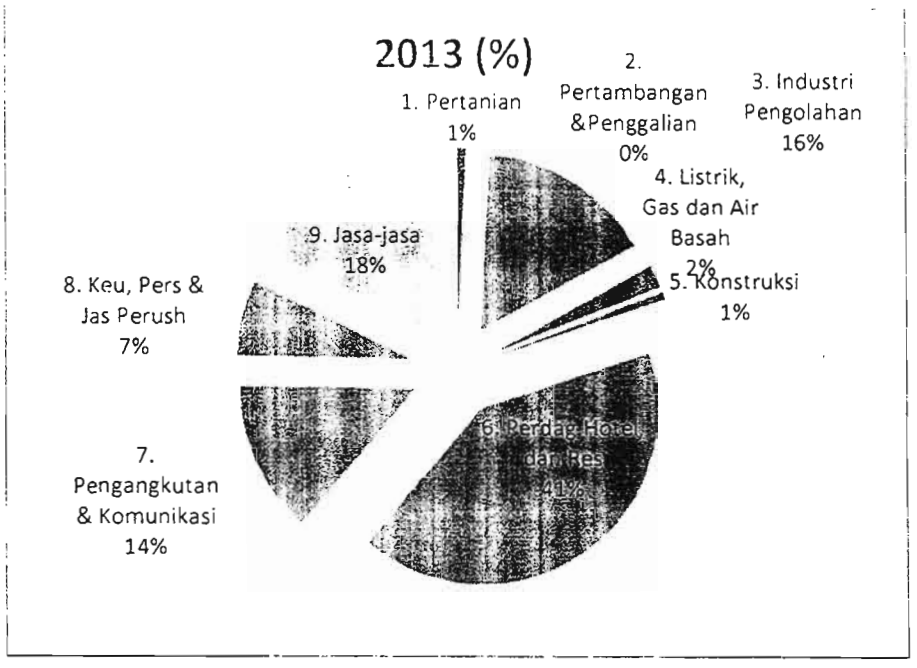
1) perdagangan, hotel, dan restoran:
2) pengangkutan dan komunikasi: serta
3) industri pengolahan.

Ketiga sektor ini mempunyai peranan besar terhadap perekonomian di Kota Mojokerto. sehingga bisa dijadikan sebagai lokomotif pertumbuhan

ekonomi. artinya dengan kontribusi yang tinggi tersebut, ketiga sektor ini dapat diintensifkan untuk meningkatkan produktivitasnya. Adapun gambaran struktur ekonomi Kota Mojokerto secara lebih jelas divisualisasikan dalam gambar di bawah ini.

Gambar 1.8:

Struktur Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2013



Sumber : BPS Kota Mojokerto diolah, 2014

Dari gambar di atas, nampak bahwa pergeseran struktur sektoral Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Mojokerto agak tersendat, namun dibandingkan dengan PDRBJawa Timur, struktur ekonomi Kota Mojokerto bergeser lebih cepat. Kondisi ini lebih diakibatkan adanya fenomena bahwa di wilayah perkotaan sektor tersier selalu cenderung mendominasi kontribusi ekonomi dibandingkan dengan sektor primer dan sekunder. Kondisi ekonomi di Kota Mojokerto, sektor tersier sangat mendominasi perekonomian, yaitu tiga perempat bagian (berkisar 76%) peranannya. sehingga sulit rasanya bagi sektor sekunder apalagi sektor primer untuk bisa mengejar peranan tersebut. Kondisi inilah yang hendaknya menjadi prioritas pembangunan Kota Mojokerto, karena keterbatasan lahan yang dimiliki, pihak birokrat bisa lebih memacu perekonomian melalui perolehan PAD pada sektor tersier.

d. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Kota Mojokerto pada awal tahun 2008 menunjukkan kondisi yang lebih baik, hal tersebut dilihat dari indikator ekonomi dan perbankan serta didukung oleh keyakinan dari membaiknya perekonomian di tahun 2008 yang diperoleh dari beberapa survei, maka diprediksi pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel 2.6 di bawah. Pertumbuhan ekonomi dari sisi sektoral disebabkan dengan selesainya sebagian besar pusat-pusat perdagangan termasuk pada subsektor jasa perusahaan yaitu pembangunan rumah-rumah; sektor industri . sepatu / sandal, yang sudah bangkit kembali dan tumbuh berkembang sampai tahapan restrukturisasi keuangan dengan diberi pinjaman modal bunga rendah; selain itu membaiknya hampir seluruh sektor ekonomi diharapkan bisa menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008-2014.

Tabel 1.9 :

Proyeksi PDRB Menurut Harga Berlaku per Sektor

Kota Mojokerto Tahun 2009 - 2013 (Juta Rupiah)

SEKTOR	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian	30.279,17	29.708,05	32.130,68	34.768,32	37.546,81
Pertambangan dan penggalian	-	-	-	-	-
Industri pengolahan	410.781,00	474.865,82	533.098.57	586.761,34	635.774,83
Listrik, gas dan air bersih	63.758.06	69.616.18	76.862.70	83.053,56	86.040,19
Konstruksi	19.890.89	23.181,79	26.970,03	30.201,07	33.165,97
Perdagangan hotel dan restoran	932.562.23	1.100.613,95	1.221.125.22	1.428.072,39	1.646.181,65
Pengangkutan dan	349.065,22	386.194,78	446.417.65	494.227,88	560.047,35

[illegible]kasi					
[illegible]gan, [illegible]waan dan [illegible] [illegible]sahaan	171.464,54	193.801,34	219.874,75	244.034,94	274.918,90
Jasa-jasa	473.242,75	521.017,88	580.823,80	636.863,88	707.649,85
PDRB	2.451.043,85	2.798.899,78	3.137.303,41	3.537.983,38	3.981.325,55

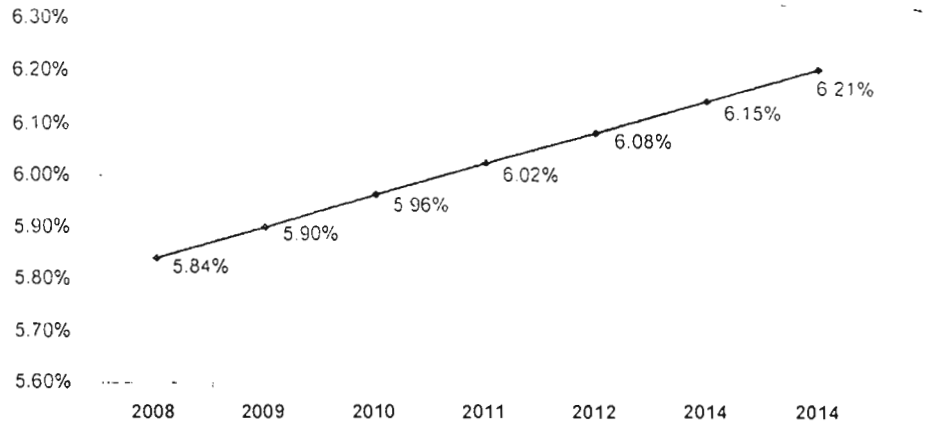
Sumber : Proyeksi diolah dari data BPS Kota Mojokerto periode 2009 – 2013

Proyeksi diatas berdasarkan kondisi data PDRB tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 yang mengalami pertumbuhan yang bervariasi. Rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 20,32%, kemudian tertinggi kedua adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 16,55% dan tertinggi ketiga adalah sektor konstruksi yaitu sebesar 16,43%. Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan terendah adalah sektor pertanian rata-rata sebesar 5,83%, sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 8,18%, sedangkan sektor pertambangan dan penggalian tidak mengalami kenaikan sesuai dengan trend di tahun 2003 – 2007 yang tidak mengalami produksi atau nilainya nol.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kota Mojokerto berdasarkan data PDRB lima tahun terakhir diperoleh diprediksi mengalami kenaikan sebagaimana yang tampak pada gambar 2.4 berikut ini.

Gambar 1.10:

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Mojokerto Tahun 2008-2014



Sumber : data diolah

e. Pendapatan Regional Per Kapita

Perkembangan sektorekonomi berdampak langsung terhadap peningkatan PDRB dan nilai PDRB per kapita pada hakekatnya menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat. Secara meyakinkan, PDRB per kapita Kota Mojokerto terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

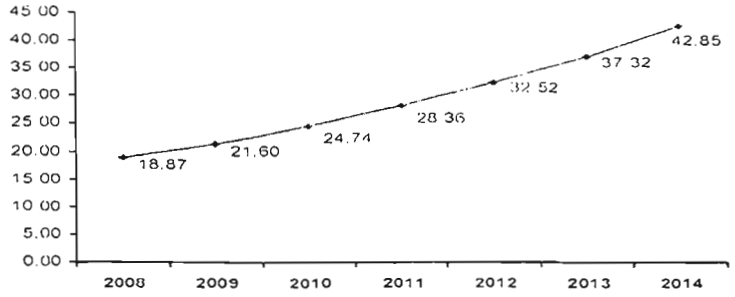
Kenaikan pendapatan perkapita tersebut sebenarnya masih mengandung kenaikan harga, namun kenaikan harga masih jauh lebih rendah daripada kenaikan pendapatan perkapita penduduk. Inflasi Kota Mojokerto yang tercermin dari Indeks implisit PDRB, pada tahun 2005 sebesar 11,64% dan tahun 2006 menjadi 10,75%. Sementara inflasi Kota Mojokerto tahun 2005 menurut IHK adalah 06%. dan pada tahun 2006 sebesar 6.71%. Dengan menghilangkan unsur kenaikan harga, maka pendapatan per kapita penduduk Kota Mojokerto tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 4,98%, dan naik menjadi sebesar 5,05 % pada tahun 2006.

Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasca krisis sudah mampu meningkatkan daya beli masyarakat Kota Mojokerto. Dengan kecenderungan turunnya harga BBM , yang mana pada triwulan terakhir Tahun 2008 ini harga BBM sudah turun sampai dua kali, diharapkan inflasi ke depannya dapat tertekan sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

Pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dengan proyeksi PDRB pada tabel 2.7 di atas, maka dapat diproyeksikan PDRB perkapitanya dengan memproyeksi pertumbuhan ekonomi pada gambar 2.5

Gambar I.11 :

Proyeksi PDRB Per Kapita Kota Mojokerto Tahun 2008 – 2014



Sumber : BPS Kota Mojokerto, 2012, diolah

f. **Ketenagakerjaan**

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam suatu kegiatan ekonomi disebut sebagai angkatan kerja. Berikut akan disampaikan paparan tentang kondisi ketenagakerjaan di Kota Mojokerto tahun 2014 :

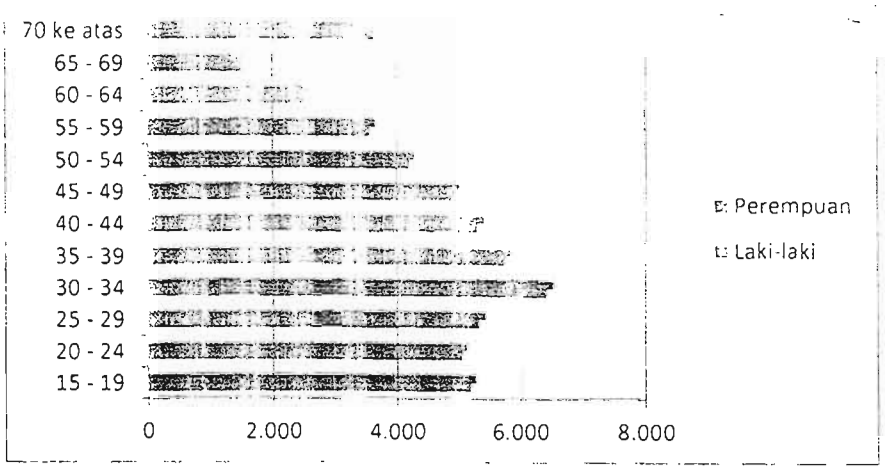
1) **Usia Kerja**

Jumlah penduduk Kota Mojokerto yang termasuk dalam usia usia kerja (> 15+) pada tahun 2014 sebesar 108.030 orang, terdiri dari 44.227 penduduk laki-laki dan 53.602 sisanya merupakan penduduk perempuan. Di setiap kelompok umur, jumlah penduduk perempuan memang lebih mendominasi dibanding penduduk laki-laki, mengindikasikan tingginya umur harapan hidup perempuan dibanding laki-laki, atau tingginya angka migrasi pada penduduk laki-laki.

Gambar 1.3

Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Kota Mojokerto Tahun 2012

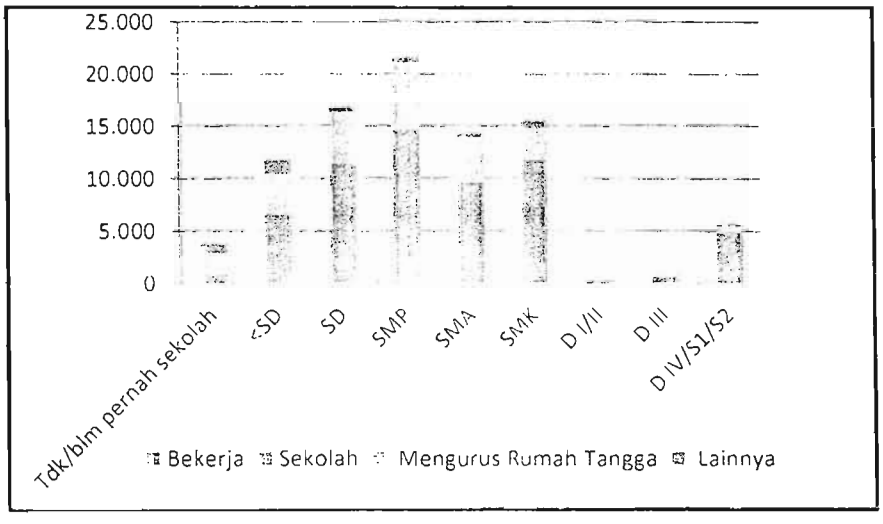


Sumber : BPS Kota Mojokerto, Sakernas 2012

Ditinjau dari tingkat pendidikan, lebih dari seperempat penduduk usia kerja (15+) di Kota Mojokerto memiliki ijazah setara SLTA (33,09 persen), diikuti oleh penduduk yang memiliki ijazah setara SD (25,47 persen), berijazah SMP (14,31 persen) dan 10,60 persen berijazah DI ke atas. Kondisi ini akan memberi gambaran kepada investor tentang kualitas dan ketersediaan pasokan tenaga kerja di Kota Mojokerto.

Gambar 1.4

Penduduk Usia Kerja menurut Pendidikan dan kegiatan terbanyak Kota Mojokerto Tahun 2014



2) Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk yang tidak aktif secara ekonomi (bukan angkatan kerja) dalam kurun waktu 2008-2013 di Kota Mojokerto terus mengalami

penurunan. Yaitu 30.948 orang (33.67 persen) pada 2008 menjadi 30.679 orang (33.22 persen) pada 2009, sekitar 28.573 orang (31,74 persen) pada 2010. 27.847 (30.36 persen) pada 2011 dan 26.453 (28,96 persen) pada 2012. Sedangkan di tahun 2013 sebanyak 32.628 atau sebesar 23,90 persen. Hal ini menggambarkan makin banyaknya penduduk Kota Mojokerto yang bergabung dalam angkatan kerja dengan status sebagai pekerja. Tentu saja ini akan menumbuhkan inovasi penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik

3) **Penduduk yang Bekerja**

Penduduk Kota Mojokerto berusia 15+ yang bekerja selama seminggu dari tahun 2008-2012 berturut-turut sebagai berikut: 53.650 (2008), 55.934 (2009), 56.836 (2010), 59.365 (2011) dan 60.144 (2012). Dari angka-angka tersebut terlihat bahwa jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dengan rata-rata sekitar 1.200 orang tiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

g. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial. Dari aspek ekonomi kemiskinan berarti ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun non makanan. Sedangkan dari aspek sosial kemiskinan berarti ketidakmampuan masyarakat dalam peran sosial.

Berdasarkan data tahun 2014, penduduk Kota Mojokerto yang tergolong sebagai penduduk miskin pada tahun 2014 adalah sebesar 18,67% atau 26.084 orang yang terbagi di 18 Kelurahan. Berikut ini data tentang jumlah penduduk miskin di masing-masing kelurahan.

Tabel I.14 :

Penduduk Miskin di Kota Mojokerto Tahun 2014

RANKING	NAMA KELURAHAN	PENDUDUK MISKIN (Jiwa)	%
1	Kedundung	3.828	14,67
2	Blooto	1.918	7,35
3	Miji	1.567	6.00
4	Kranggan	2.121	8,13
5	Prajurit kulon	2.148	8,23
6	Surodinawan	1.373	5,26
7	Wates	1.873	7,18
8	Mentikan	1.694	6,49
9	Pulorejo	1.510	5,79
10	Meri	1.373	5,26
11	Magersari	904	3,46
12	Gunung gedangan	1.887	7,23
13	Balongsari	1.975	7,57
14	Kauman	465	1,78
15	Gedongan	359	1,37
16	Jagalan	444	1,70
17	Purwotengah	292	1,12
18	Sentanan	353	1,35
	TOTAL =	**26.084**	**100.00**

Sumber: Data RT Miskin Kota Mojokerto Tahun 2014

Pada tabel di atas tampak bahwa Kelurahan Kedundung memiliki jumlah penduduk miskin yang paling besar yaitu 14.67% atau 3.828 orang dan yang terendah adalah Kelurahan Purwotengah sebanyak 1,12 % atau 292 orang.

Jika diamati lebih jauh, ternyata sebagian besar penduduk miskin di Kota Mojokerto tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja, yaitu sebanyak 27% dari jumlah penduduk miskin. Gambar 1.15 di bawah memberi informasi tentang kondisi penduduk miskin berdasarkan pekerjaannya.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menargetkan pengurangan angka kemiskinan sebesar 25% (dari 15,81%) pada tahun 2014. Dengan demikian, maka pada tahun 2014 nanti diharapkan jumlah penduduk miskin menjadi tidak lebih dari 11,81% atau sekitar 12% dari total jumlah penduduk Kota Mojokerto.

Tekad untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan, antara lain program bedah rumah, wajib belajar 12 tahun, penguatan modal UMKM, dan lain-lain.

h. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Perkembangan kondisi sosial daerah merupakan salah satu tolok ukur untuk melihat sejauh mana keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan kondisi tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sebagai gambaran, perkembangan IPM Kota Mojokerto diperbandingkan dengan Provinsi Jawa Timur ditunjukkan pada Tabel 1.16 di bawah.

Tabel 1.16:

IPM Kota Mojokerto dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2008-2012

No	Uraian	IPM				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	IPM Kota Mojoketo	76.11	76.43	77.02	77.50	77.63
	Perkembangan naik/turun	-	0.32	0.59	0.48	0.13
2	IPM Jawa Timur	70.38	71.06	71.62	72.18	72.54
	Perkembangan naik/turun	-	0.68	0.56	0.56	0.36
3	Selisih IPM Kota Mjkt vs jatim +/-	5.73	5.37	5.40	5.32	5.09

Sumber : BPS Kota Mojokerto 2014, diolah

Secara konsisten dari tahun 2008 sampai 2012 terlihat bahwa IPM Kota Mojokerto selalu lebih tinggi dari IPM Provinsi Jawa Timur, dimana selisihnya

cukup tinggi, yaitu 5.09 sampai5,73 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa IPM Kota Mojokerto berada di atas rata - rata IPM sebagian besar kabupaten/ kota di Jawa Timur. Rata-rata IPM Kota Mojokerto dari tahun 2008 – 2012 adalah sebesar 76,94, sedangkan rata-rata IPM Jawa Timur pada rentang tahun tersebut adalah 71.56. Pada tahun 2012, nilai IPM Kota Mojokerto menunjukkan angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 77.63.

Sejalan dengan perkembangan IPM Jawa Timur, IPM Kota Mojokerto juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan yang konsisten ini menunjukkan adanya peningkatan yang berkelanjutan pula dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan kepada masyarakat Kota Mojokerto, karena tingkat kesejahteraan suatu kabupaten/kota tidak dapat dipisahkan dari kemampuan kabupaten/kotadalam memberikan layanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang lebih baik dan bermutu.

Adapun faktor-faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai IPM adalah: (1) Rata-rata Lama Sekolah; (2) Tingkat Konsumsi Masyarakat; (3) Angka Melek Huruf; dan (4) Angka Harapan Hidup. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pembangunan sumber daya manusia di Kota Mojokerto yang berdampak pada keempat faktor di atas telahdilakukan dengan baik dan berkelanjutan.

i. Pendidikan

Melalui pengamatan terhadap kondisi fasilitas pendidikan yang tersedia di Kota Mojokerto, terlihat bahwa masih banyak terdapat keterbatasan, khususnya berkenaan dengan fasilitas pendidikan pada tingkat sekolah menengah atasdan perguruan tinggi. Data mengenai fasilitas pendidikan, jumlah murid dan guru di Kota Mojokerto disajikan pada Tabel 2.17 di bawah.

Pada tingkat pendidikan Taman Kanak - kanak sampai Sekolah Menengah Pertama, rasio jumlah murid per guru dan jumlah murid per sekolah menunjukkan komposisi yang optimal. Di tingkat TK, rasio murid per guru dan murid per sekolah masing-masing sebesar 16 dan 76, yang berarti 16 murid per guru. Di tingkat SD, rasio murid per guru dan murid per sekolah masing-masing sebesar 20 dan 237, yang berarti 20 murid per guru. Di tingkat SMP, rasio murid per guru dan murid per sekolah masing-masing sebesar 15 dan 487, yang berarti 15 murid per guru.

Tabel 1.17:

Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Menurut Tingkat Pendidikan

di Kota Mojokerto Tahun 2014

Tingkat dan Status	Sekolah	Guru	Murid	rasio
1. Taman Kanak-kanak	64	296	4.879	4.62%
2. Sekolah Dasar	60	719	14.208	5.12%
3. Sekolah Menengah Pertama	18	583	8.724	7.24%
4. Sekolah Menengah Umum	11	392	4332	7.33%
5. Sekolah Menengah Kejuruan	11	473	6.446	8.33%
6. Sekolah Keagamaan				
- MI	9	189	2.495	7.59%
- MTS	2	36	228	15.10%
- MAN	1	41	519	6.02%
	176	2.729	41.831	7.67%

Sumber : Data Pokok Pendidikan Kota Mojokerto, 2014

Untuk kondisi Sekolah Keagamaan, minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan di sekolah keagamaan tidak sebesar di sekolah negeri, kecuali di tingkatan sekolah dasar. Di Sekolah MI, rata-rata murid per sekolahnya dapat dikatakan lebih tinggi daripada di SD Negeri, yaitu sebesar 277 per sekolah, bahkan masih mungkin untuk dikembangkan mengingat rasio murid terhadap guru yang masih kecil, yaitu 13 murid per guru. Sedangkan di tingkat sekolah menengah pertama dan atas, minat masyarakat mengenyam pendidikan di MTS (114 murid per sekolah) dan MAN (519 murid per sekolah) menurun, terlihat dari jumlah murid per sekolah yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan di SMP dan SMU Negeri. Namun begitu, rasio murid per guru di MTS dan MAN masih sangat kecil, masing-masing sebesar 18 dan 41. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi Sekolah Menengah Kejuruan, dimana minat masyarakat untuk mengenyam pendidikan di dalamnya sangat besar. Dilihat dari jumlah muridnya yang lebih banyak, dimana total murid SMU sebanyak 4.332 orang dan total murid SMK sebanyak 6.446 orang. Untuk jumlah sekolahnya, terdapat 11 gedung SMU dan 11 gedung SMK. Dapat disimpulkan bahwa Sekolah Kejuruan memiliki